

Analisis Komparatif Angka Kemiskinan Sebagai Dampak Kebijakan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga di Kecamatan Leuwigoong Kabupaten Garut

Andhika Lungguh Perceka^{a*}

^a STIKes Karsa Husada, Garut, Jawa Barat, Indonesia

INFORMASI ARTIKEL

Article history:

Dikirim tanggal: 09 Juli 2018

Revisi pertama tanggal: 17 Juli 2018

Diterima tanggal: 13 September 2018

Tersedia *online* tanggal: 23 Oktober 2018

Keywords: poverty rate, policy impact, empowerment economy

ABSTRACT

Comparison of the economy in 2010 and 2016 before and after the policy by creating an empowerment program to improve the economy of the community. The research method used is an explanatory approach with survey techniques. The population in this study is the poverty rate in the Leuwigoong sub-district which amounts to 8 villages with a total of 4519 families. Prehistoric economic data was obtained from Leuwigoong District. From the comparison of the community economy, there is a difference between the economic results of the community before and after the policy because the value of (2-tailed) produces a number of 0.000 < 0.05 and the results are significant.

INTISARI

Perbandingan perekonomian di Tahun 2010 dan 2016 sebelum dan sesudah kebijakan dengan membuat program pemberdayaan guna untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan eksplanasi dengan teknik survei. Populasi dalam penelitian ini adalah angka kemiskinan di Kecamatan Leuwigoong yang berjumlah delapan desa dengan jumlah keluarga 4519 keluarga. Data perekonomian prasejarah diperoleh dari Kecamatan Leuwigoong. Dari perbandingan perekonomian masyarakat maka terdapat perbedaan antara hasil Perekonomian masyarakat sebelum dan sesudah Kebijakan di karenakan nilai dari (2-tailed) menghasilkan angka 0,000 < dari 0,05 dan hasilnya menentukan signifikan.

2018 FIA UB. All rights reserved.

1. Pendahuluan

Kemisikinan merupakan masalah maupun tantangan terbesar di Negara yang sedang berkembang. Dalam praktik penanggulangan kemiskinan diperlukan komitmen bersama antara pemerintah daerah selaku pelaksana kebijakan, DPRD sebagai pembuat kebijakan, dan masyarakat untuk mengawal dan mengimplementasikan kebijakan daerah dalam bentuk program penanggulangan kemiskinan.

Dalam sistem pemerintahan desentralisasi atau otonomi daerah, maka pengentasan kemiskinan tetap menjadi prioritas utama sasaran pembangunan disetiap pemerintah daerah dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia dalam bidang kesehatan, pendidikan serta daya beli masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat sebagai bentuk pelayanan, pengabdian dan tanggung jawab bagi masyarakat didaerahnya.

* Corresponding author. Tel.: +62-823-1865-2390; e-mail: andhikalperceka@gmail.com

Secara geografis Kabupaten Garut memiliki luas wilayah 3.065,19 dengan jumlah penduduk sebanyak 2.585 juta jiwa. Sebagai daerah penunjang Ibu Kota Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Garut berbatasan langsung Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Cianjur dan Samudra Indonesia.

Angka kemiskinan di kabupaten Garut sebanyak 12,86% masih diatas angka kemiskinan di Jawa Barat, hal ini disebabkan kurang meratanya pembangunan dari segi ekonomi, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan di Kabupaten Garut (Pemprov Jabar, 2017).

Tingginya angka kemiskinan di Garut diakibatkan karena kurang meratanya faktor – faktor pendukung untuk memajukan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu faktor infrastruktur juga merupakan salah satu faktor penyebab kurangnya pemerataan di Kabupaten Garut.

Kecamatan Leuwigoong memiliki jumlah kepala kepala keluarga sebanyak 12.468 KK atau 45.225 jiwa (BPS Kabupaten Garut, 2010). Kecamatan Leuwigoong termasuk Salah satu kecamatan di Garut yang masyarakatnya memiliki kategori jumlah keluarga prasejahtera cukup banyak adalah Kecamatan Leuwigoong. Pada Tahun 2010 Kecamatan Leuwigoong terbagi atas delapan desa dan kelurahan diantaranya, Pertama Desa Margahayu dengan jumlah keluarga 1824 keluarga diantaranya 14,86% penduduknya termasuk keluarga pra sejahtera atau sebanyak 271 keluarga prasejahtera. Kedua Desa Margacinta dengan jumlah kepala keluarga 1510 kepala keluarga diantaranya 17,81% penduduknya termasuk keluarga pra sejahtera atau sebanyak 269 keluarga prasejahtera. Ketiga, Desa Dungusiku dengan jumlah keluarga 1316 keluarga diantaranya 47,17% penduduknya termasuk keluarga pra sejahtera atau sebanyak 621 keluarga prasejahtera. Keempat, Desa Tambaksari dengan jumlah keluarga 1156 keluarga diantaranya 32,76% penduduknya termasuk keluarga pra sejahtera atau sebanyak 379 keluarga prasejahtera. Kelima, Desa Karang Sari dengan jumlah keluarga 1100 keluarga diantaranya 55,33% penduduknya termasuk keluarga pra sejahtera atau sebanyak 609 keluarga prasejahtera. Keenam, Desa Karanganyar dengan jumlah keluarga 1104 keluarga diantaranya 56,42% penduduknya termasuk keluarga pra sejahtera atau sebanyak 623 keluarga prasejahtera. Ketujuh, Desa Leuwigoong dengan jumlah keluarga 2270 keluarga diantaranya 38,57% penduduknya termasuk keluarga pra sejahtera atau sebanyak 1049 keluarga prasejahtera. Kedelapan, Desa Sindangsari dengan jumlah keluarga 2188 keluarga diantaranya 31,89% penduduknya termasuk keluarga pra sejahtera atau sebanyak 698 keluarga prasejahtera. Dari angka tersebut, sebanyak 39.66% Kepala keluarga termasuk

dalam kategori keluarga pra sejahtera (Kantor Kecamatan Leuwigoong, 2010:56-57).

Dari data diatas Kecamatan Leuwigoong menjadi satu dari beberapa Kecamatan di Kabupaten Garut yang warganya masuk dalam kategori miskin atau pra sejahtera. Melihat fakta di atas, sebetulnya kecamatan ini sudah diintervensi oleh berbagai program pemberdayaan masyarakat diantaranya Jaring Pengaman Sosial (JPS), Kelompok Usaha Bersama (KUBE), dan lain sebagainya yang dimulai sejak beberapa tahun sebelum Tahun 2010 yang mana Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga mulai ada. Namun, apabila melihat data di atas, program-program pemberdayaan masyarakat yang pernah ada ternyata kurang memberikan dampak signifikan bahkan bisa dikatakan belum berhasil dalam upaya menurunkan jumlah warga berkategori miskin atau keluarga pra sejahtera.

Hal ini tentunya menarik bagi peneliti untuk mengungkap lebih jauh efektivitas program-program berbasis pemberdayaan masyarakat terhadap upaya penurunan jumlah keluarga pra sejahtera yang berada di Kecamatan Leuwigoong sebelum adanya intervensi program ekonomi keluarga sekaligus membandingkan bagaimana kondisi kemiskinan setelah adanya program ekonomi keluarga.

2. Teori

2.1 Tinjauan Tentang Analisis Kemiskinan

Secara geografis maupun sosiologis kemiskinan memiliki lima aspek dasar yang membentuknya. Lima aspek ini dikenal dengan istilah (*deprivation trap*) meliputi: kondisi miskin, rasa tidak berdaya, kondisi darurat, tidak mandiri dan keterasingan (Chambers, 2010:146).

Perekonomian suatu negara sangat dipengaruhi oleh kemiskinan bangsanya. Khususnya negara berkembang (dikenal dengan negara ketiga) kemiskinan terjadi dengan sangat kompleks dan multidimensi. Kompleks berarti terjadi melalui proses dan waktu lama dengan akar permasalahan yang sulit ditentukan. Sedangkan multidimensi berarti berhubungan dengan berbagai macam aspek terkait kekurangan aset, organisasi politik, ilmu dan keterampilan, jaringan sosial, keuangan dan informasi. Kemiskinan ini dapat tergambarkan dari adanya kekurangan gizi, perumahan tak layak, kesehatan yang terganggu dan level pendidikan yang rendah.

Siklus kemiskinan ini dibuat dan dibentuk oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, baik kebutuhan akan makanan, pakaian, pendidikan (*The endless cycle of Poverty*) (Kuncoro, 2010:157).

Kemiskinan dapat disebabkan oleh kurangnya modal seseorang dalam menghadapi tantangan hidup dan berusaha, baik secara fisik, materi, pendidikan, keterampilan dan keahlian sehingga menyebabkan produktivitas seseorang menjadi rendah. Apabila produktivitas seseorang rendah maka pendapatannya menjadi rendah sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan kemiskinan pun meningkat. Dampak dari meningkatnya kemiskinan dimasyarakat akan menyebabkan rendahnya tabungan dan menurunnya investasi sehingga berputar seterusnya sehingga kekurangan modal dan pembangunan menjadi lambat (Kuncoro, 2010:157).

Mengacu pada paradigma lingkaran kemiskinan, peningkatan kemiskinan mempengaruhi daya simpan masyarakat pada kepemilikan barang, baik yang sifatnya harta bergerak maupun tidak bergerak. Hal tersebut menunjukkan rendahnya angka investasi bagi proses produksi sebagai salah satu modal pembangunan. Sehingga keterbatasan modal ini akan memaksa penurunan produktivitas yang menyebabkan rendahnya pendapatan.

Banyak paradigma terkait dengan kemiskinan, dimana cara pandang tidak berfokus pada penampilan fisik. Pertama adalah keamanan, adanya lingkungan kerja yang aman mendorong produktivitas produksi dimasyarakat. Kedua, adanya kebijakan yang memajukan lingkungan. Ketiga adanya kebebasan dalam berkarya atau memilih pekerjaan. Keempat, adanya akses yang terjangkau oleh masyarakat baik kebutuhan barang, informasi, maupun infrastruktur. Kelima, adanya keadilan politik/ tidak memihak. Keenam berupa pemerataan pembangunan. Terakhir kondisi lingkungan sosial masyarakat.

Pada konteks kedaerahan kemiskinan masih menjadi perhatian penting. Secara umum kemiskinan terjadi saat kebutuhan tidak dapat terpenuhi. Ada dua dimensi yang perlu diperhatikan dari kemiskinan, yaitu pendapatan dan non pendapatan (Winardi, 2010:89). Sedangkan pendapat lain kemiskinan terjadi karena masyarakat tidak dapat memenuhi standar minimum kebutuhan, selain itu kemiskinan terjadi akibat adanya kesenjangan pendapatan (Todaro & Smith, 2004:21).

Masyarakat pra Sejahtera adalah sejumlah penduduk yang tidak mampu mendapatkan kebutuhan sandang, pangan dan papan yang bersifat sangat dasar (BPS Kabupaten Kulon Progo, 2007:11). Pendekatan yang digunakan oleh BPS hingga saat ini untuk metode sensus hitungan penduduk miskin yaitu dengan pendekatan kebutuhan dasar. Dengan demikian kemiskinan diidentikkan dengan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar sehingga dibutuhkan kebijakan yang berbeda untuk menangani dua tipe kemiskinan ini.

Dalam menghadapi guncangan ekonomi Kemiskinan kronis dapat diantisipasi oleh kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, kemudahan permodalan, kemudahan informasi dan pemerataan pembangunan infrastruktur diseluruh daerah. Sementara untuk melindungi rumah tangga dalam kemiskinan sementara dapat diatasi dengan berbagai perlindungan asuransi dan tabungan deposit.

Kemiskinan dapat dibedakan berdasarkan kedalaman, keparahan, dan tipe. Klasifikasi ini meliputi kemiskinan *chronic (chronic poverty)* dan kemiskinan sementara (*transient poverty*). Kemiskinan kronis ditujukan jika kemiskinan terjadi dengan terus meningkat, kesejahteraan yang rendah dan terjadi dalam waktu yang lama. Kemiskinan sementara terjadi dalam waktu singkat dibandingkan dengan kemiskinan kronis (Arsyad, 2004:239). Selain itu, menurut Sri Kuncoro (2010) menyebutkan bahwa kemiskinan dapat dibagi menjadi kemiskinan absolut, kemiskinan relatif dan kultural.

Kemiskinan absolut mewakili seseorang dengan pendapatan perkapita dibawah standar yang ditandai dengan tidak mempunyai memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemiskinan relatif terwakili oleh seseorang yang kondisi miskinnya bergantung dari kondisi standar hidupnya. Terakhir terkait kemiskinan kultural, terjadi akibat adanya ketidakmauan kelompok untuk berubah atau memperbaiki hidupnya.

Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya kemiskinan di daerah-daerah. Hal ini dapat terkait tiga aspek pembangunan manusia yang belum optimal seperti kurangnya pendapatan, rendahnya tingkat pendidikan, tuna aksara, sempitnya kesempatan kerja, kesehatan belum optimal, kurang sanitasi dan kebersihan lingkungan. Istilah kemiskinan terus berkembang tidak hanya dipahami sebagai Ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidup akan tetapi juga ketidakmampuan akan pemenuhan hak-hak dasarnya seperti fasilitas pelayanan kesehatan yang layak, pendidikan, kemudahan informasi sehingga diperlukan peran pemerintah dalam memenuhi kebutuhan tersebut.

2.2 Tinjauan Tentang Kebijakan Publik

Kebijakan digambarkan sebagai sebuah kebijaksanaan atau peraturan dari individu, kelompok atau instansi untuk menyelesaikan hambatan atau kesulitan bahkan memberikan kesempatan untuk mencapai sebuah orientasi.

Dengan demikian kebijakan publik dapat diartikan sebagai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk memecahkan masalah yang terjadi ditatanan publik yang

tersurat dalam bentuk peraturan yang mengikat dan memaksa.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

Hasil dari wawancara menyatakan dalam jangka waktu enam tahun ini perkembangan perekonomian dengan seiringnya diadakannya pelatihan-pelatihan yang di ambil untuk perkembangannya perekonomian masyarakat berjalan dengan baik di buktikannya dengan adanya data yang menurun dari angka kemiskinan dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2016. Walaupun angka tersebut terlihat sangat kecil perubahannya, tetapi upaya kami dari pihak kecamatan sudah bekerja semaksimal mungkin untuk memperkecil perekonomian masyarakat di Kecamatan Lewigoong ini.

3. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini dengan pendekatan eksplanasi dan teknik survei. Metode penelitian ekplanasi merupakan metode penelitian mencari keterangan atau penjelasan dengan tujuan menjelaskan hubungan kausalitas atau sebab akibat yang ada dan berusaha untuk mencari variabel pengamatan. Populasi dalam penelitian ini adalah angka kemiskinan di Kecamatan Lewigoong yang berjumlah delapan desa dengan jumlah keluarga 4519 keluarga dengan jumlah sampel 98 keluarga. Jenis data yang diteliti mencakup data deskriptif dan data verifikatif. Data deskriptif didasarkan atas hasil wawancara dan observasi.

Data tersebut diolah dan dianalisis dengan menggunakan kaidah-kaidah ilmiah. Adapun data verifikatif bersumber pada hasil penyebaran angket kepada responden. Lokasi penelitian merupakan tempat berlangsungnya penelitian ini, yaitu Kecamatan Lewigoong (Kabupaten Garut) yang terdiri dari delapan desa.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Hasil Analisis Data

4.1.1 Uji Normalitas

Uji normalitas pada penelitian ini 0,05 sehingga menggunakan uji *Shapiro-Walk* $P = 0.790$ dengan nilai probabilitas (p) > 0 .. Sehingga dapat disimpulkan data berasal dari distribusi normal.

4.1.2 Uji Homogenitas

Berdasarkan nilai rata-rata diperoleh nilai statistik Lavene untuk tes nya adalah 0.086 dengan nilai probabilitas (Sig.) 0,771. Berdasarkan hasil di atas dinyatakan bahwa nilai (Sig.) $0,771 > 0,05$ data menunjukkan varians yang sama.

4.1.3 Uji Two Way Anova

Berdasarkan uji perbandingan *dependent* variabel dengan menggunakan uji *two way* ANOVA dalam jangka waktu enam tahun hasil pertumbuhan ekonomi masyarakat meningkat. Hal ini dikatakan berhasil karena 1919 kepala keluarga sukses dalam pelaksanaan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk masyarakat Lewigoong. Data ini ditunjang dengan hasil wawancara yang menyatakan bawa adanya peningkatan dalam perekonomian masyarakat, namun tidak sesuai dengan target yang di inginkan.

4.1.4 Uji t-test

Hasil uji T-Test dari perbandingan perekonomian masyarakat maka terdapat perbedaan antara hasil Perekonomian masyarakat sebelum dan sesudah Kebijakan dikarenakan nilai dari (*2-tailed*) menghasilkan angka $0,000 < 0,05$ dan hasilnya menentukan signifikan.

4.2 Pembahasan

Kebijakan pemerintah dimaksudkan untuk mengatasi hambatan dan memberikan peluang untuk mencapai sebuah tujuan (Agustino, 2008:7). Dengan demikian kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan.

Untuk membangun kepercayaan masyarakat dibutuhkan suatu kebijakan yang membuat suatu jejak yang sangat berarti bagi masyarakat, sehingga masyarakat nyaman dan merasa terbantu dengan adanya kebijakan itu sendiri dalam membangun kepercayaan terhadap kebijakan.

Berdasarkan hasil uji Normalitas data analisis perekonomian masyarakat di Kecamatan Lewigoong dengan menggunakan data populasi berdistribusi normal menghasilkan nilai (sig.) $0.790 >$ dari nilai signifikan $\alpha = 0,05$.

Berdasarkan dilihat dari uji homogenitas diperoleh nilai statistik Lavene untuk tes nya adalah 0.086 dengan nilai probabilitas (Sig.) 0,771.

Dilihat dari uji *Two way* Anova perbandingan perekonomian masyarakat sebelum dan sesudah kebijakan maka nilai Sig. $0,000 <$ dari $0,05$ artinya terdapat pengaruh yang signifikan yang terjadi setelah kebijakan, maka kesimpulan yang peneliti simpulkan terdapat perbedaan angka kemiskinan sebelum dan

sesudah adanya perberdayaan ekonomi keluarga di Kecamatan Leuwigoong.

Dilihat dari uji T-test hasil perbandingan terhadap perbandingan perekonomian masyarakat maka tidak terdapat perbedaan antara hasil perekonomian masyarakat sebelum dan sesudah Kebijakan dikarenakan nilai dari (2-tailed) menghasilkan angka $0,131 >$ dari $0,05$ dan hasilnya menentukan tidak signifikan.

Dilihat dari hasil wawancara perekonomian selama kurang lebih enam tahun dalam menerapkan kebijakan di Kecamatan Leuwigoong terbilang sudah efektif, namun perkembangan perbandingan yang sedikit membuat kebijakan tersebut tidak diteruskan.

Dalam pelaksanaan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah khususnya Kecamatan Lewigoong Kabupaten Garut untuk meningkatkan perekonomian prasejahtera, masyarakat diikut sertakan dalam pelatihan, diberikan fasilitas injaman untuk pertanian dan peternakan. Untuk mengubah *mindset* masyarakat ini pemerintah ikut turun tangan dalam pelaksanaannya, sehingga dampak dari kegiatan ini merubah masyarakat untuk lebih terbuka dalam pelaksanaan kebijakan ini.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan tentang analisis komparatif angka kemiskinan sebagai dampak program pemberdayaan ekonomi keluarga di Kecamatan Lewigoong Kabupaten Garut, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a) Untuk mengatasi permasalahan yang ada dimasyarakat diperlukan adanya kebijakan publik yang dibuat oleh penyelenggara negara sesuai dengan bidangnya masing-masing;
- b) Peran pemerintah sebagai stabilisator dalam menjaga perekonomian agar berjalan normal; dan
- c) Kebijakan publik diperuntukkan ketertiban umum dan masyarakat menjadi sejahtera.

Daftar Pustaka

- Agustino, Leo. (2008). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Arsyad, Lincoln. (2004). *Ekonomi Pembangunan, Edisi Keempat*. STIE YKPN, Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo. (2007). *Rasio Gini Kabupaten Kulon Progo*. BPS & BAPPEDA Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut. (2010). *Data Jumlah Masyarakat Prasejahtera di Kabupaten Garut*. Tersedia pada <https://garutkab.bps.go.id/%20stactictable/2015/12/04/76/jumlah-keluarga-di-kabupaten-garut-berdasarkan-tahapan-kesejahteraan-2014.html> [Diakses pada 15 April 2017].

- Chambers, Robert. (2010). *Pembangunan Desa Mulai dari Belakang*. Jakarta: LP3ES.
- Kuncoro, Mudrajad. (2010). *Masalah, Kebijakan, dan Politik Ekonomika, Edisi ke 5*. Jakarta: Erlangga.
- Kuncoro, Sri. (2010). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran, dan Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2011. *Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta*, Surakarta.
- Pemprov Jabar. (2017). *Data Letak Geografis Kabupaten Garut*. Tersedia pada <http://jabarprov.go.id/index.php/pages/id/1045> [Diakses pada 5 April 2017].
- Kantor Kecamatan Leuwigoong. (2010). *Profil Kecamatan Leuwigoong Tahun 2010*. Kecamatan Leuwigoong, kabupaten Garut
- Todaro, Michael P., & Smith, Stephen C. (2004). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Edisi kedelapan*. Jakarta: Erlangga.
- Winardi. (2010). *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: PT. Gramedia.